



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Kamis 13 Februari 2025



## RINGKASAN BERITA HARI INI

### Perjalanan Dinas Dipangkas dan Studi Banding Dilarang

Pemkab Terbitkan Edaran Efisiensi Anggaran

**SIDOARJO** - Instruksi presiden perihal efisiensi belanja pemerintah ditindaklanjuti Pemkab Sidoarjo. Sekretaris daerah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900.1.12.1/1740/438.6.2/2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2025. Di antaranya, tidak ada lagi studi banding dan perjalanan dinas dikurangi 50 persen.

**EFISIENSI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025 DI SIDOARJO**

- 1. Penghematan belanja seremonial
- 2. Pengurangan belanja percetakan, publikasi, dan kajian
- 3. Anggaran perjalanan dinas dikurangi sebesar 50 persen
- 4. Kegiatan studi banding dilarang dilaksanakan
- 5. Pembatasan honorarium
- 6. Memprioritaskan anggaran untuk peningkatan indikator pelayanan publik

Sumber: Pemkab Sidoarjo

efisiensi, antara lain, penghematan belanja seremonial. OPD diminta mengurangi pengeluaran untuk kegiatan seremonial, sosialisasi, dan forum diskusi kelompok (FGD), khususnya yang menggunakan layanan sewa tempat, hotel, paket rapat, serta jasa *event organizer*. Pemanfaatan aset daerah ditutamakan untuk mengurangi biaya. Misalnya, di mal



APBD itu kan keputusan bersama. Sehingga, jika ada perubahan, dibahas bersama."

ABDILLAH NASIH  
Ketua DPRD Sidoarjo

Lalu, ada pembatasan honorarium. Pemberian honorarium yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi OPD dibatasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Kelima, memprioritaskan anggaran pada pelayanan publik. OPD diminta meng-

alokasikan anggaran untuk peningkatan indikator pelayanan publik untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran. "Harapan kita, pelayanan publik di Sidoarjo semakin optimal," katanya. Surat edaran tersebut diterbitkan sebagai langkah awal sebelum Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan petunjuk teknis terkait efisiensi belanja di masing-masing OPD. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mengatakan, pihaknya akan patuh terhadap inpres. Namun, terkait detail efisiensi akan dibicarakan bersama oleh legislatif dan eksekutif. "APBD itu kan keputusan bersama. Sehingga, jika ada perubahan dibahas bersama," katanya. Misalnya, terkait apa yang dihambat, besarnya, pengalihannya, dan lainnya. (uzi/fal)

### Ayo Outdoor Learning di Sidoarjo Saja

KEPALA DINAS Kepemudaan Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Sidoarjo, Yudi Iriyanto S S o s M S i , mempromosikan



Yudi Iriyanto S S o s M S i

kalau destinasi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, selain tidak kalah dengan luar daerah, juga dianggapnya ramah dengan para siswa yang ada sekolah. "Saya berani jamin, destinasi wisata di Sidoarjo yang kita masukkan dalam city tour, ada sekitar 26 destinasi wisata, semuanya di-

ke halaman 11

### Ketua Dewan Imbau OPD Ciptakan Inovasi Tidak Harus Memakai Dana APBD



Abdillah Nasih

**Sidoarjo, Bhirawa**  
Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih, menghimbau kepada semua OPD di Pemkab Sidoarjo apabila menciptakan inovasi pelayanan publik, saat ini tidak mesti

harus menggunakan dana dari APBD. Namun, bisa dilakukan salah satunya dengan cara menjalin kemitraan. Antara Pemerintah dengan pihak swasta. Menurut Abdillah Nasih, cara tersebut bisa diterapkan oleh Pemerintah, karena ada aturannya. "Itu peluang yang bisa kita jalankan dan bisa kita manfaatkan," kata Abdillah Nasih, ketika membuka acara Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digelar oleh Bappeda Sidoarjo, Rabu (12/2) di ruang delta karya Setda Sidoarjo. Disampaikan oleh Abdillah Nasih, apa yang dirinya sampaikan tersebut tidak lepas sebagaimana Inpres Nomor 1 tahun 2025, tentang efisiensi APBN dan APBD, namun tak sampai "memotong" mesin penggerak Pemerintahan. Inovasi pelayanan publik, kata Abdillah Nasih, wajib dibuat oleh OPD Sidoarjo untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan murah kepada masyarakat. Namun proses dalam menjalankan inovasi

tersebut, menurut Nasih, harus bisa menghemat anggaran. Menurut Nasih, kemitraan untuk mempercepat layanan publik itu, bisa dijalankan dalam berbagai sektor yang menjadi tugas OPD. Misalnya pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertanian, lingkungan, ekonomi, sosial dan lainnya. "Kita boleh menjalin kerja sama B to B, ada aturannya, tidak masalah, jangan menggunakan APBD terus," komentar Nasih. Sekdakab Sidoarjo, Fenny Abridawati, sangat berterima kasih dengan ide brilian dari Ketua DPRD Sidoarjo itu. Dirinya punga angan-angan, akan membenahi lingkungan di sekitar jalan Tol Pondok Chandra di Kecamatan Waru. Dengan cara kemitraan, dirinya ingin pada tahun 2025 ini pembenahan lingkungan di lokasi itu bisa terwujud. Fenny memotivasi agar OPD di Pemkab Sidoarjo supaya setiap OPD punya satu inovasi. Namun prosesnya tidak harus dibiayai dari dana

APBD. Juga tidak perlu harus dengan biaya yang mahal-mahal. "Ide ini sangat bagus, sayang kalau diabaikan untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Kemendagri, Aferi Syaamsidar, secara live streaming juga mengapresiasi ide-ide dari Ketua DPRD Sidoarjo yang dianggapnya luar biasa itu. "Dari jajaran dewan di Sidoarjo, juga bisa berinovasi seperti itu, tolong bisa dikembangkan," komentarnya. Aferi dalam kesempatan itu menyebut score dari indeks inovasi daerah dari Kabupaten Sidoarjo terus mengalami peningkatan. Dari angka 62,8, kini menjadi 75,96. Ini membuat peringkat Sidoarjo juga semakin naik, yang semula tahun 2023 lalu peringkat 23, pada tahun 2024 lalu menjadi peringkat ke 19. [kus.dre]



**Sidoarjo Bersholawat Meriahkan Harjasda**

**SIDOARJO** - Rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Ke-166 Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) masih berlangsung, Selasa (11/2) malam, dilihat Sidoarjo Bersholawat bersama Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf di area parkir Mal Pelayanan Publik (MPP) Lingkar Timur. Pdt Bupati Sidoarjo Subandi beserta istri, Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Dandim 0816, Kapolres Sidoarjo, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sidoarjo hadir. Kegiatan tersebut diikuti ribuan jemaah. Acara diawali dengan pembacaan salawat serta doa bersama untuk para sepuh yang telah berjasa dalam membangun Kabupaten Sidoarjo. Juga, doa bersama demi kemajuan dan keberkahan Kabupaten Sidoarjo. Subandi mengatakan, kegiatan itu menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersyukur atas pencapaian daerah serta perjalanan panjang Kabupaten Sidoarjo. "Semoga Sidoarjo menjadi daerah yang lebih baik, maju, dan sejahtera," ujarnya. Rangkaian peringatan Harjasda meniscayakan tiga agenda besar. Yakni, peresmian Gedung Diagnostik Terpadu RSUD RT Notopuro pada 15 Februari, musik Festival Guyon Waton pada 21 Februari, dan Pekan Raya Jayadaru pada 16-22 Februari. (uzi/fal)



**KURANG KONSENTRASI**: Kondisi mobil yang menabrak pikap bermuatan telur di ruas tol Sidoarjo-Waru kemarin (12/2).

### Pemkab Inventarisasi...

inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah tersebut. Dari hasil peninjauan, ditemukan bahwa kerusakan paling parah terjadi di lorong penghubung antarkelas. "Plafon di beberapa titik sudah jebol, sementara atap mengalami kebocoran akibat rembesan air hujan," ujarnya saat melakukan peninjauan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) serta Ketua Komisi D

DPRD Sidoarjo. Ainur mengungkapkan bahwa SDN Kedungsumur 1 belum masuk dalam agenda perbaikan tahun ini. Oleh karena itu, pihaknya berencana mengalokasikan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk segera memperbaiki kondisi bangunan sekolah. "Meningkat kondisi yang cukup parah, perbaikan harus segera dilakukan agar tidak membahayakan siswa dan tenaga pendidik," katanya. (sai/vga)

## Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Pemkab Inventarisasi Sekolah Rusak, SDN Kedungsumur 1 Masuk Prioritas

KREMBUNG-Kondisi atap dan plafon SDN Kedungsumur 1 semakin memprihatinkan. Meski kerusakan terus bertambah parah, sekolah tersebut belum masuk dalam daftar perbaikan tahun ini.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo, Ainur Rahman, melakukan

PARAH: Kerusakan atap plafon yang terjadi di SDN Kedungsumur 1

● Ke Halaman 10

CS Dipindai dengan CamScanner



### ✓ Pemkab Inventarisasi...

inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah tersebut. Dari hasil peninjauan, ditemukan bahwa kerusakan paling parah terjadi di lorong penghubung antarkelas.

"Plafon di beberapa titik sudah jebol, sementara atap mengalami kebocoran akibat rembesan air hujan," ujarnya saat melakukan peninjauan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) serta Ketua Komisi D

DPRD Sidoarjo.

Ainur mengungkapkan bahwa SDN Kedungsumur 1 belum masuk dalam agenda perbaikan tahun ini. Oleh karena itu, pihaknya berencana mengalokasikan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk segera memperbaiki kondisi bangunan sekolah.

"Mengingat kondisi yang cukup parah, perbaikan harus segera dilakukan agar tidak membahayakan siswa dan tenaga pendidik," katanya. (sai/vga)

CS Dipindai dengan CamScanner





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Aset PT KAI Dieksekusi

*Sidoarjo - HARIAN BANGSA*  
*Pengadilan Negeri Sidoarjo*  
*mengeksekusi aset milik KAI*  
*yang dikuasai pihak yang*  
*tidak bertanggungjawab,*  
*Rabu (12/2). Aset tersebut*  
*berada di halaman pintu*  
*masuk Stasiun Sidoarjo.*

**MANAGER** Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, mengungkapkan bahwa eksekusi dilakukan pada 2 bangunan rumah dinas dan tanah dengan SHGB No. 1549 dan SHGB No. 1551/ Kel. Lemahputro, milik PT. KAI (Persero).

Sengketa kepemilikan lahan ini berkekuatan hukum tetap yaitu berdasarkan putusan No. 242/Pdt.G/PN.Sda jo No.216/PDT/2024/PT. Sby yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sebagai langkah awal, PT KAI (Persero) melakukan upaya persuasif kepada 14 termohon eksekusi. Sebanyak 8 termohon eksekusi telah bersedia mengosongkan secara sukarela pada hari Senin (10/2). "Dan saat ini 6 termohon eksekusi yang dilakukan eksekusi oleh PN Sidoarjo dan akan dikembalikan aset tersebut kepada KAI," ucap

Luqman Arif.

Salah satu aset yang akan di eksekusi diketahui digunakan untuk usaha parkir liar, yang tidak memiliki perizinan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Luqman Arif menambahkan, penyelamatan aset negara termasuk lahan akan terus dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada lahan di sekitar Stasiun Sidoarjo.

Proses penyelamatan aset negara ini sudah melalui jalan panjang, termasuk mediasi melihatkan 2 pihak yang bersengketa. Gugatan ini awalnya bermula dari rencana penyelamatan aset tersebut oleh PT KAI (Persero).

Tapi 14 warga melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor perkara 242/Pdt.G/2023/PN Sda. Setelah digelar persidangan, majelis hakim menyatakan pemilik lahan tersebut adalah PT KAI (Persero). "Begitupun saat para penggugat tersebut banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur, putusannya tetap sama yaitu lahan milik PT KAI

# Ketua Dewan Imbau OPD Ciptakan Inovasi Tidak Harus Memakai Dana APBD



Abdillah Nasih

## Sidoarjo, Bhirawa

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih, menghimbau kepada semua OPD di Pemkab Sidoarjo apabila menciptakan inovasi pelayanan publik, saat ini tidak mesti

harus menggunakan dana dari APBD.

Namun, bisa dilakukan salah satunya dengan cara menjalin kemitraan. Antara Pemerintah dengan pihak swasta. Menurut Abdillah Nasih, cara tersebut bisa diterapkan oleh Pemerintah, karena ada aturannya.

"Itu peluang yang bisa kita dijalankan dan bisa kita manfaatkan," kata Abdillah Nasih, ketika membuka acara Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digelar oleh Bappeda Sidoarjo, Rabu (12/2) di ruang delta karya Setda Sidoarjo.

Disampaikan oleh Abdillah Nasih, apa yang dirinya sampaikan tersebut tidak lepas sebagaimana Inpres Nomor 1 tahun 2025, tentang efisiensi APBN dan APBD, namun tak sampai "memotong" mesin penggerak Pemerintahan.

Inovasi pelayanan publik, kata Abdillah Nasih, wajib dibuat oleh OPD Sidoarjo untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan murah kepada masyarakat. Namun proses dalam menjalankan inovasi

tersebut, menurut Nasih, harus bisa menghemat anggaran.

Menurut Nasih, kemitraan untuk mempercepat layanan publik itu, bisa dijalankan dalam berbagai sektor yang menjadi tugas OPD. Misalnya pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertanian, lingkungan, ekonomi, sosial dan lainnya.

"Kita boleh menjalin kerja sama B to B, ada aturannya, tidak masalah, jangan menggunakan APBD terus," komentar Nasih. Sekdakab Sidoarjo, Fenny Apridawati, sangat berterima kasih dengan ide brilian dari Ketua DPRD Sidoarjo itu.

Dirinya punya angan-angan, akan membenahi lingkungan di sekitar jalan Tol Pondok Chandra di Kecamatan Waru. Dengan cara kemitraan, dirinya ingin pada tahun 2025 ini membenahan lingkungan di lokasi itu bisa terwujud.

Fenny memotivasi agar OPD di Pemkab Sidoarjo supaya setiap OPD punya satu inovasi. Namun prosesnya tidak harus dibiayai dari dana

APBD. Juga tidak perlu harus dengan biaya yang mahal-mahal.

"Ide ini sangat bagus, sayang kalau diabaikan untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Kepala Pusat Strategi kebijakan Pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Kemendagri, Aferi Syamsidar, secara live streaming juga mengapresiasi ide-ide dari Ketua DPRD Sidoarjo yang dianggapnya luar biasa itu.

"Dari jajaran dewan di Sidoarjo, juga bisa berinovasi seperti itu, tolong bisa dikembangkan," komentarnya.

Afery dalam kesempatan itu menyebut score dari indeks inovasi daerah dari Kabupaten Sidoarjo terus mengalami peningkatan. Dari angka 62,8, kini menjadi 75,96.

Ini membuat peringkat Sidoarjo juga semakin naik, yang semula tahun 2023 lalu peringkat 23, pada tahun 2024 lalu menjadi peringkat ke 19. [kus.dre]



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## MITRA

### Ayo Outdoor Learning di Sidoarjo Saja

**KEPALA DINAS** Kepemudaan Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Sidoarjo, **Yudi Iriyanto SSos MSi**, mempromosikan



kalau destinasi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, selain tidak kalah dengan luar daerah, juga dianggapnya ramah dengan para siswa yang ada sekolah.

“Saya berani jamin, destinasi wisata di Sidoarjo yang kita masukkan dalam city tour, ada sekitar 26 destinasi wisata, semuanya di-

Yudi Iriyanto SSos MSi

▶▶ ke halaman 11

HARIAN Bhirawa

### Ayo Outdoor Learning di Sidoarjo Saja

## ● Sambungan hal 1

jamin ramah dengan siswa sekolah," sebut Yudi Iriyanto, saat mempromosikan destinasi wisata ramah siswa sekolah, belum lama ini.

Menurutnya destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sidoarjo tidak kalah dengan di tempat lain. Hanya saja belum banyak masyarakat yang mengetahuinya.

Dinas Kepemudaan Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Sidoarjo mempromosikannya ke berbagai kalangan. Termasuk kepada kalangan siswa di sekolah.

Ini perlu dan penting, sebab di Kabupaten Sidoarjo telah ada surat edaran (SE) dari Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, tertanggal 3 Pebruari 2025, yang menyatakan supaya kegiatan pembelajaran di luar kelas atau ODL ( Outdoor Learning) pada satuan pendidikan, hanya bisa dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Surat edaran itu harus diperhatikan dan dilaksanakan.

Destinasi wisata itu, ada yang masuk dalam kategori Geopark, Waterpark, Educational and Family Tourism, Adventure and Nature Site, Culture and Traditional Market, Religius Market, Resto and Culinary Food, Facility and Public Sport, dan Museum and Historical Sites.

Yudi menyebut salah satu contoh, di Kecamatan Wonoayu, ada wisata kampung lali gadget. Wisata ini mengajak para pengunjung untuk memanfaatkan permainan tradisional, zaman dahulu, sehingga tidak

setiap hari masyarakat melulu berinteraksi dengan smartphone.

Juga, ada museum mpu Tantular di Kecamatan Buduran. Tempat wisata edukasi ini tepat sebagai tempat untuk melihat dan memperoleh informasi kepada siswa akan hasil karya adiluhung budaya tradisional dari nenek moyang bangsa Indonesia.

Kemudian juga ada destinasi wisata petik jambu, di Desa Kebaron Kecamatan Tulangan. Disini ada konsep wisata belanja, rekreasi dan edukasi. Para siswa di sekolah bisa memanfaatkan untuk kegiatan ODL nya.

“Saya tidak bisa menyebut satu persatu di sini, karena jumlah banyak, hampir ada di semua wilayah kecamatan di Sidoarjo,” kata Yudi.

Untuk keperluan ini, Disporapar Sidoarjo telah mengundang para Kepala Sekolah di Sidoarjo dan para pegiat wisata yang ada di Sidoarjo. Juga mempromosikan lewat youtube channel.

ODL yang banyak dilakukan di wilayah Sidoarjo, menurut Yudi, selain akan membuat dunia wisata di Sidoarjo bangkit dan berkembang, dampaknya juga akan bisa menumbuh kembangkan ekonomi dari warga sekitar.

“Mari ODL di Sidoarjo saja, kami menunggu,” pungkas Yudi. [kus.gat]





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## KILAS DELTA



DOA BERSAMA: Sidoarjo Bersholawat digelar di area parkir Mal Pelayanan Publik (MPP) Lingkar Timur pada Selasa (11/2) malam.

## Sidoarjo Bersholawat Meriahkan Harjasda

**SIDOARJO** – Rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Ke-166 Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) masih berlangsung. Selasa (11/2) malam, dihelat Sidoarjo Bersholawat bersama Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf di area parkir Mal Pelayanan Publik (MPP) Lingkar Timur.

Plt Bupati Sidoarjo Subandi beserta istri, Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Dandim 0816, Kapolres Sidoarjo, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sidoarjo hadir. Kegiatan tersebut diikuti ribuan jemaah.

Acara diawali dengan pembacaan salawat serta doa bersama untuk para sesepuh yang telah berjasa dalam membangun Kabupaten Sidoarjo. Juga, doa bersama demi kemajuan dan keberkahan Kabupaten Sidoarjo.

Subandi mengatakan, kegiatan itu menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersyukur atas pencapaian daerah serta perjalanan panjang Kabupaten Sidoarjo. "Semoga Sidoarjo menjadi daerah yang lebih baik, maju, dan sejahtera," ujarnya.

Rangkaian peringatan Harjasda menyisakan tiga agenda besar. Yakni, peresmian Gedung Diagnostik Terpadu RSUD RT Notopuro pada 15 Februari, musik Festival Guyon Waton pada 21 Februari, dan Pekan Raya Jayandaru pada 16-22 Februari. (uzi/fal)



PJR 8 DITLANTAS POLDA JATIM

**KURANG KONSENTRASI:** Kondisi mobil yang menabrak pikap bermuatan telur di ruas tol Sidoarjo-Waru kemarin (12/2).

**Jawa Pos**

## Perjalanan Dinas Dipangkas dan Studi Banding Dilarang

Pemkab Terbitkan Edaran Efisiensi Anggaran

**SIDOARJO** - Instruksi presiden perihal efisiensi belanja pemerintah ditindaklanjuti Pemkab Sidoarjo. Sekretariat daerah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900.1.12.1/1740/438.6.2/2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2025. Di antaranya, tidak ada lagi studi banding dan perjalanan dinas dikurangi 50 persen.

"(Inpres Nomor 1 Tahun 2025) harus disambut dan dilaksanakan. Sebagai kepala daerah, harus menjalankan dengan baik," kata Plt Bupati Sidoarjo Subandi kemarin (12/2). SE tersebut disampaikan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Beberapa poin langkah

### EFISIENSI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025 DI SIDOARJO

- 1 Penghematan belanja seremonial
  - 2 Pengurangan belanja percetakan, publikasi, dan kajian
  - 3 Anggaran perjalanan dinas dikurangi sebesar 50 persen
  - 4 Kegiatan studi banding dilarang dilaksanakan
  - 5 Pembatasan honorarium
  - 6 Memprioritaskan anggaran untuk peningkatan indikator pelayanan publik
- Sumber: Pemkab Sidoarjo
- 

efisiensi, antara lain, penghematan belanja seremonial. OPD diminta mengurangi pengeluaran untuk kegiatan seremonial, sosialisasi, dan forum diskusi kelompok (FGD), khususnya yang menggunakan layanan sewa tempat, hotel, paket rapat, serta jasa *event organizer*. Pemanfaatan aset daerah diutamakan untuk mengurangi biaya. Misalnya, di mal

pelayanan publik, di aula kantor dinas, dan lainnya. Kedua, pengurangan belanja percetakan, publikasi, dan kajian. OPD harus menekan biaya cetak dokumen serta publikasi dan kajian yang tidak mendesak. Ketiga, efisiensi perjalanan dinas. Anggaran perjalanan dinas dikurangi sebesar 50 persen dan kegiatan studi banding dilarang dilaksanakan.



APBD itu kan keputusan bersama. Sehingga, jika ada perubahan, dibahas bersama."

**ABDILLAH NASIH**  
Ketua DPRD Sidoarjo

Lalu, ada pembatasan honorarium. Pemberian honorarium yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi OPD dibatasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Kelima, memprioritaskan anggaran pada pelayanan publik. OPD diminta meng-

alokasikan anggaran untuk peningkatan indikator pelayanan publik untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran. "Harapan kita, pelayanan publik di Sidoarjo semakin optimal," katanya.

Surat edaran tersebut diterbitkan sebagai langkah awal sebelum Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan petunjuk teknis terkait efisiensi belanja di masing-masing OPD. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut.

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mengatakan, pihaknya akan patuh terhadap inpres. Namun, terkait detail efisiensi akan dibicarakan bersama oleh legislatif dan eksekutif. "APBD itu kan keputusan bersama. Sehingga, jika ada perubahan dibahas bersama," katanya. Misalnya, terkait apa yang dihemat, besarnya, pengalihannya, dan lainnya. (uzi/fal)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



LINDUNGI INDUSTRI TEMBAKAU: Pemusnahan rokok ilegal di kantor Bea Cukai Sidoarjo kemarin (12/2). Kerugian negara akibat peredaran rokok tersebut mencapai Rp 13,5 miliar. ANDRER BONDAN/ANSA POC

## 19 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp 26,3 Miliar Dimusnahkan

Diamankan dari Wilayah Sidoarjo, Surabaya, dan Mojokerto

**SIDOARJO** - Jutaan batang rokok ilegal dimusnahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo kemarin (12/2). Rokok ilegal tersebut diamankan dari wilayah Sidoarjo, Surabaya, dan Mojokerto. Kepala Kantor Bea Cukai Sidoarjo Rudy Hery Kurniawan mengungkapkan, total

ada 19.027.275 batang rokok ilegal yang dimusnahkan dengan cara dibakar. "Ini adalah batang rokok ilegal yang kami amankan sejak awal September hingga Desember 2024," katanya. Nilai rokok ilegal tersebut Rp 26,3 miliar. Kerugian negara yang dihasilkan dari adanya peredaran rokok tersebut mencapai Rp 13,5 miliar. "Ini adalah upaya dan wujud nyata komitmen kami

dalam penegakan hukum, termasuk melindungi industri tembakau," ujarnya. Batang rokok ilegal yang dikemas siap jual itu melanggar aturan karena penggunaan pita cukai bekas. Ada juga yang menggunakan pita cukai palsu. Bahkan, ada rokok tanpa pita cukai sama sekali. Rudy menjelaskan bahwa penindakan tidak hanya dengan mengamankan dan memusnahkan rokok ilegal. Tetapi,

juga menindak pelaku yang menjual dan mendistribusikan. Hingga saat ini pihak Bea Cukai Sidoarjo masih terus menyelidiki pelaku. "Namun, kami mengedepankan sanksi administrasi dan ultimatum remedium sebagai langkah fiskal recovery," paparnya. Pihaknya mengundang Plt Bupati Sidoarjo Subandi sekaligus untuk mengajak berkolaborasi memberantas peredaran rokok ilegal di

Sidoarjo. Selain pemusnahan di Kantor Bea Cukai Sidoarjo, sejumlah rokok ilegal lainnya dikirim ke Mojokerto untuk dimusnahkan. Rudy juga menyampaikan akan mengoptimalkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk industri tembakau lokal. "Kolaborasi dengan Pemkab Sidoarjo juga membantu untuk memberantas peredaran rokok ilegal," ujarnya. (eza/fal)

# Jawa Pos



## SIDOARJO-GRESIK

memorandumonline & memorandumpolri  
memorandum

KAMIS LEGI, 13 FEBRUARI 2025

KEPALA BIRO: BUDI JONJO SANTOSO. WARTAWAN: Kriston. PEMASARAN/IKLAN: Arel Maulidin, Suprianto, Pitono. TELEPON/SMS REDAKSI/IKLAN BIRO SIDOARJO: 083831013777 EMAIL: areksidoarjo@gmail.com

HALAMAN 7

# Polisi Ajak Santri Cegah Narkoba dan Pergaulan Bebas

**Sidoarjo, Memorandum**  
Polisi mengajak santri turut andil dalam upaya pencegahan peredaran, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan bebas di kalangan remaja. Hal itu disampaikan Kapolsek Tulangan AKP Abdul Cholil saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Darunnajah di Kajeksan, Selasa (12/2) malam.  
Di hadapan ratusan santri, AKP Abdul Cholil menyampaikan bahwa pengaruh narkoba dan pergaulan bebas sangat meresahkan. "Paling riskan karena menyasar anak-anak dan remaja," katanya.  
Sebab itu, AKP Abdul Cholil bersama Pengasuh Ponpes Darunnajah KH M Makin Zakaria sepakat untuk secara masif menangkal peredaran penyalahgunaan narkoba serta bahaya pergaulan bebas.



Kapolsek Tulangan AKP Abdul Cholil memberi tausiyah tentang bahaya narkoba kepada santri Ponpes Darunnajah Kajeksan.

baik dari pertemanan maupun dampak negatif dari tidak bijaknya penggunaan sosial media tal) anak atau remaja goyah. Ini Berada di pesantren, menurutnya, santri mendapatkan pengajaran yang baik. (kaf/ep)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Kabupaten Sidoarjo Dinobatkan sebagai Pemda Dengan Pengelolaan DBHCHT Terbaik 2024

admin 12 jam ago 0 4 mins



Spread the love dnnmmedia



DNN, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dinobatkan sebagai pemerintah daerah dengan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terbaik tahun 2024 dari Kantor Bea Cukai Sidoarjo.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I, Untung Basuki, kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Sidoarjo, H. Subandi, pada Rabu (12/2/2025) pagi tadi.

Acara penghargaan ini bertepatan dengan kegiatan pemusnahan 19 juta batang rokok ilegal hasil penindakan KPPBC TMP B Sidoarjo selama bulan September hingga Desember 2024 di halaman Kantor Bea Cukai Kanwil Jatim I.

Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo berkomitmen mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal. Menurutnya, peredaran rokok ilegal merugikan banyak pihak, mulai dari kerugian bagi negara hingga ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi dengan berbagai pihak akan terus diperkuat.

"Mari kita terus berkoordinasi, bekerja sama, dan menjaga komitmen untuk melawan peredaran rokok ilegal demi terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang tertib, aman, dan sehat," ujarnya.





Plt Bupati Sidoarjo, H Subandi bersama Kapolresta Sidoarjo, Kombes Cristian Tobing dan Kepala Bea dan cukai jatim Untung Basuki saat melaksanakan pemusnahan rokok ilegal di halaman kantor Bea dan cukai Sidoarjo

Kepala Kantor Bea Cukai Sidoarjo, Rudy Hery Kurniawan, menyampaikan bahwa Kabupaten Sidoarjo telah memanfaatkan DBHCHT dengan sangat baik, salah satunya melalui pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Ia menekankan bahwa KIHT di Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya di Jawa Timur.

"Kami mengapresiasi Kabupaten Sidoarjo yang telah memanfaatkan DBHCHT dengan membangun Kawasan Industri Hasil Tembakau, yang hingga saat ini hanya ada di Sidoarjo," ungkapnya.

Rudy juga menambahkan bahwa peran aktif pimpinan Kabupaten Sidoarjo dalam pemberantasan rokok ilegal menjadi salah satu faktor penilaian dalam penghargaan ini. Pemkab Sidoarjo dinilai aktif melakukan sosialisasi pemberantasan rokok ilegal melalui berbagai media, seperti televisi, media cetak, dan media sosial. Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga secara rutin mengadakan operasi pasar bersama. Administrasi terkait perencanaan dan pelaporan pengelolaan DBHCHT pun dinilai sangat tertib. Ia berharap sinergi antarinstansi terus ditingkatkan agar pemberantasan rokok ilegal semakin efektif.

"Sebagaimana diketahui, pemanfaatan DBHCHT dialokasikan 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk sektor kesehatan, dan 10 persen untuk penegakan hukum. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerja sama yang telah terjalin. Semoga kita terus berpartisipasi dalam memberantas rokok ilegal," ujarnya.

Lebih lanjut, Rudy menyampaikan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo berhasil melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Dari periode September hingga Desember 2024, sebanyak 19 juta batang lebih rokok ilegal berhasil disita, dengan nilai barang mencapai lebih dari Rp26 miliar.

"Jika barang ini berhasil lolos, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp13 miliar," Pungkasnya. (Hans/kominfo)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Ketua DPRD Sidoarjo Imbau OPD Ciptakan Inovasi Tak Harus Memakai Dana APBD

8 Peristiwa & Berita & Bincang-bincang - 12 February 2020



Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nash

### **Sidoarjo, Bhirawa.**

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nash, menghimbau kepada semua OPD di Pemkab Sidoarjo apabila menciptakan inovasi pelayanan publik, saat ini tidak

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Namun, bisa dilakukan asan lainnya dengan cara menjalin kemitraan. Antara Pemerintah dengan pihak swasta. Menurut Abdilah Nasih, cara tersebut bisa diterapkan oleh Pemerintah, karena ada aturannya.

"Tbu peluang yang bisa kita dijalankan dan bisa kita manfaatkan," kata Abdilah Nasih, ketika membuka acara Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digelar oleh Bappeda Sidoarjo, Rabu (12/2) di ruang delta karya Selda Sidoarjo.

Diampaikan oleh Abdilah Nasih, apa yang dirinya sampaikan tersebut tidak lepas sebagaimana Inpres Nomor 1 tahun 2025, tentang efisiensi APBN dan APBD, namun tak sampai "memotong" mesin penggerak Pemerintahan.

Inovasi pelayanan publik, kata Abdilah Nasih, wajib dibuat oleh DPRD Sidoarjo untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan murah kepada masyarakat. Namun proses dalam menjalankan inovasi tersebut, menurut Nasih, harus bisa menghemat anggaran.

Menurut Nasih, komitmen untuk mempercepat layanan publik itu, bisa dijalankan dalam berbagai sektor yang menjadi tugas DPRD. Misalnya pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertanian, lingkungan, ekonomi, sosial dan lainnya.

"Kita boleh menjalin kerja sama B to B, ada aturannya, tidak masalah, jangan menggunakan APBD terus," komentar Nasih. Sekdakab Sidoarjo, Fenny Apridawati, sangat berterima kasih dengan ide brilian dari Ketua DPRD Sidoarjo itu.

# Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo Kawal Petani Gogol Warga Terung Kulon Kecamatan Krian





*Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo hearing bersama warga desa terung kulon kec krian (Foto: ist)*

SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com – Rapat hearing digelar ruang rapat DPRD kabupaten sidarjo lantai 2 , pada selasa 11/2/2025, dipimpin sekretaris komisi A, Remontara Wahyudi .ST. mewakili ketua komisi A . H. Riza Ali Faizin ,MLPd yang sedang ibadah umroh, ikut hadir pula anggota komisi A, Blok suciati .SH dari partai PKB dan Komisi D H.Bangun winarso anggota DPRD yang rumah tinggalnya di desa Terung kulon.

Nur yahya warga desa terung kulon kecamatan krian kabupaten Sidoarjo menceritakan sejarah tanah yang disoal.

Desa terung kulon punya sawah gogol di sebelah selatan desa berbatasan dengan desa jumwangi kecamatan krian.

Masih Nur yahya menceritakan di perbatasan desa tersebut ada tanah yang luasan kurang lebihnya 1 hektar dengan jumlah petani pemilik sawah gogol ada 80 orang atau 80 ancer sawah, jadi tanah tersebut posisi di sebelah selatan sawah petani.

"Posisi datarannya lebih tinggi sedikit dari pada dataran sawah tersebut ,pada jaman dulu sekitar tahun 1980 sampai 1990 waktu saya masih sekolah SMA,setiap tahunnya di sewa oleh pabrik gula untuk jalan rel lory muat tebu. Bapak kepala desa waktu itu mengundang para petani gogol dan termasuk bapak saya untuk menerima uang sewa tanah tersebut.Kalau kami orang petani gogol pemilik sawah mengacu pada sejarah tersebut maka tanah tersebut maka adalah milik para petani,kalau tanah tersebut dijadikan tanah aset kas desa kami keberatan," ujar Nur Yahya.

Sementara, Sekretaris komisi A DPRD kabupaten sidarjo , Raymond Tara Wahyudi, ST menjelaskan hal tersebut biar dibantu Pak H.Bangun yang merupakan anggota DPRD komisi D, rumah tinggalnya di desa terungkulon tempat lokasi tanah yg di soal tersebut.

Sedangkan H. Bangun winarso membahas masalah ini akan di agendakan lagi dilanjut di desa terung kulon nantinya,jelas H.Bangun Winarso.